JRPA - Journal of Regional Public Administration
ISSN Print: 2584-7736; ISSN Online: 2774-8944
Volume 9, No. 1, Juni 2024

https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa

EFEKTIVITAS DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI ANAK TERLANTAR DI KOTA SUKABUMI

Tuah Nur[1], Arla Alfiah[2], Syifa Rizqia Zulfa[3], Muhammad Hilmi Ridwan*[4]
[1,2,3,4] Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Article Info

Article history:

Received Maret 12, 2024
Revised April 8, 2024
Accepted Mei 30, 2024

Keywords:

Service
Social Welfare
Homeless Child

Corresponding Author:

Muhammad Hilmi Ridwan
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R. Syamsudin S.H. No 50 Sukabumi
Email: hilmiridwan27@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on the problem of increasing the number of abandoned children and the problems of the Social Service in implementing social welfare services for abandoned children in Sukabumi City. Purpose: The purpose of this study was to find out whether there were any innovations made by the Sukabumi City Social Service in tackling neglected children. Method: This method uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The theory used is the Theory of Effectiveness by Duncan (in Steers, 2012: 53) where there are 3 dimensions seen from the achievement of goals, integration and adaptation. Data collection techniques using interviews, observation and documentation

Copyright © 2023 JRPA. *All rights reserved.*

1. INTRODUCTION

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji. (Amelia 2015).

Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami Indonesia, menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi, yaitu jumlah anak terlantar yang meningkat setiap tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Berdasarkan dataKementerian Sosial yang diambil dariDashboard Data TerpaduKesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS- NG per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang. (Rahayu and Marini 2022).

Fenomena anak terlantar menjadisalah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besardi Indonesia. Apabila dicermatidengan baik, ternyata anak terlantar perlu mendapat perhatian saat ini sebab maraknya anak-anak terlantar. (Herlina 2014). Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anakterlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dankasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Menurut Departemen Sosial RI (2006:1), ketelantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yakni (1) faktor ketidaksengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua ataukeluarga untuk memenuhi kebutuhananaknya, (2) faktor kesengajaan untukmenelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya. (Pande, Andrianawati, and Cardiah 2021).

Data penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa sangat padatnya pendududuk di Kota Sukabumi tidak lepas daripermasalahan sosial yang dialamipenduduk Kota Sukabumi terutamapada permasalahan kemiskinan dan ketelantaran. Banyaknya jumlah totalpenduduk Kota Sukabumi yangmencapai 353.455 jiwa dan 490 jiwa diantaranya merupakan anakterlantar.

Kesejahteraan Sosial merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan setiap manusia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial tersebut. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa ‘’ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara ‘’. Kewajiban negara dalam memelihara dan mensejahterakan anak terlantar masihbelum tercapai sepenuhnya, hal inidibuktikan dengan tercatatnya masih banyaknya jumlah anak terlantar di Indonesia. Pemerintah sebagai bagiandari negara memiliki kewajiban dalam mengurusi anak terlantar. Pemerintah daerah sebagai wakil Pemerintah pusat di daerah yang mempunyai wewenang untuk mengurusi urusan pemerintahannya sendiri, salah satunya urusan yang berkaitan dengan permasalahan sosialdi daerah. Dinas Sosial merupakaninstansi pemerintah daerah yang menaungi urusan di bidang sosial salah satunya PMKS bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). (Syarifsyah Asyraf Syabana 2557)

Dalam hal ini upaya dalam menanggulangi Anak terlantar Pemerintah Kota Sukabumi memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota SukabumiNo.6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosialdengan isi rehabilitasi sosial anak jalanan/terlantar, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya. Peratuan inilah yang mendasari pemerintah Kota Sukabumi untukmeminimalisir sebab akibat dari anak jalanan.

Ada beberapa permasalahan darihambatan berkaitan denganpelaksanaan kesejahteraan sosial bagianak terlantar sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi. Masih banyakpenyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak terlantar yang belum terakses pelayanan kebutuhan dasar. Masih Kurangnya pelayanandasar dan bantuan sosial kepada anakterlantar. Pelayanan dasar tersebut seperti tempat tinggal (panti sosial), pelayanan rehabilitasi, pelayanan pembinaan dan pelatihan bagi anak terlantar, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut dikuatkan dengan penjelasan pada isu strategis dan permasalahan pada dinas sosial kota Sukabumi.

Dinas Sosial Kota Sukabumi masih kekurangan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan fasilitas tempat tinggal anak terlantar.Jumlah anak terlantar yang tinggi di Kota Sukabumi seharusnya harus di imbangi dengan jumlah fasilitas tempat tinggal untuk anak terlantar yang memadai dan sarana prasarana operasinal Dinas Sosial yang mendukung. (LKIP Dinas Sosial Kabupaten Tangerang 2020).

Kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola pelayanan terhadap anak terlantar baik di Kantor Dinas Sosial maupun di panti sosial dan UPTD. Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadihambatan dalam pelaksanaan pelayanan bagi anak terlantar.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Simangungsong, 2017). Penulis mengumpulkan data melaui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secaramendalam terhadap 2 orang informanyang terdiri dari Pekerja Sosial Ahli Muda dan Pekerja Sosial.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Dalam penelitian ini, untuk mengukur Efektivitas Dinas Sosialdalam Menanggulangi Anak Terlantar di Kota Sukabumi yaitu menggunakan 3 dimensi teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 2012) (1) Pencapaian Tujuan (2) Integrasi (3) Adaptasi. Adapun penjelasan mengenai Efektivitas Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak Terlantar di Kota Sukabumi yaitu sebagai berikut:

1. **Pencapaian Tujuan Program Prestasi di Dinas Sosial Kota Sukabumi.**
   Pencapaian tujuan sebagai indikator yang melihat efektivitas program prestasi melalui sub- indikator yaitu kurun waktu, sasaran dan dasar hukum.
   1) Kurun Waktu
      Program ini bergerak dan efektif pada bulan januari tahun 2022. Tiap anak dibutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyesuaikan dengan keadaan yang baru dan merubah pola pikir anak menjadi lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurun waktu pencapaian tujuan dari Program Prestasi untuk merubah kehidupan anakmenjadi lebih baik telahsesuai target.
   2) Sasaran
      Program ini sudah tercapai sesuai target yang bisa dilihat dari perkembangan anak terlantar yang telah dibina disini. Data anak terlantar yangberhasil terverifikasi padatahun 2021 ada 12 yang dibina dan 59 anak yang di tangani oleh Program Prestasi. Sasaran daripembinaan ini sudah sesuai target, yaitu padaanak terlantar.Perkembangan yang ditunjukkan dari perilaku dan pola pikir anak yang sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebihbaik.
   3) Dasar Hukum
      Pembentukan ProgramPrestasi ini didasari olehPeraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan isi rehabilitasi sosial anak jalanan/terlantar, gelandangan, pengemisdan lain sebagainya.Peratuan inilah yang mendasari pemerintah Kota Sukabumi untuk meminimalisir sebab akibat dari anak jalanan.
2. **Integrasi**
   Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa inggris "integration" yang berarti kesempurnaan ataukeseluruhan. Integrasi yang dimaksud dalam hal iniadalah bagaimana programpembinaan anak terlantar inidapat membaur ke dalam masyarakat dan lembaga lain sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh seper yang diharapkan oleh pemerintah yaitu mensukseskan program ini sesuai dengan tujuan awal yang telah diharapkan. Dimensi ini akan diukur dengan dua kriteria yaituprosedur dan proses sosialisasi.
   1) Prosedur Pembinaan Dalam proses penerima ananak jalanan ini berasaldari laporan masyarakat dan melakukan penjaringan oleh Dinas Sosial, Pekerja Sosial dan Satpol PP Penjaringan dilakukan di setiap pusat- pusat keramaian di Kota Sukabumi yang meliputi terminal, dan perempatan lampu merah di berbagai lokasi. Sasarannya adalah Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan, serta beberapa bagian yang mengisi assesment di Dinas Sosial terkait anak terlantar. Setelah dilakukannya pelaporan, langsung masukkankedalam data untuk dilakukannya pendataanjumlah anak yang dibina, jadi Dinas Sosial selalu mengupdate data anak- anak disini. Selainpendidikan formal, mereka juga diberikanpendidikan informal. Jadi, pengetahuan mereka tidakhanya sebatas pendidikan di sekolah, tapi mereka diberikan pendalamantentang agama danmengasah bakat.
   2) Proses Sosialisasi Memberikan pengenalan atau sosialisasi terhadap program pembinaan kepada masyarakat.
3. **Adaptasi**
   Adaptasi adalah kemampuanuntuk dapat menyesuaikandengan lingkungansekitarnya, indikator iniuntuk mengetahuipeningkatan kemampuan anak sehingga program ini dapat dikatakan telah berjalan efektif ataukah belum.
   1) Peningkatan Kemampuanmeliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dengan dilakukan pembinaan melalui bimbingan mental, dalam membentuk perilaku untuk menyadarkan anak tersebut adalah dengan memperhatikan mentalnya yaitu memperbaiki sikap dan perilaku.
2. Tahap transformasi, melalui bimbingan sosial dengan cara memberi pengetahuan dan ilmu sosial memahami bahwamenjadi anak terlantardapat merugikanmasyarakat sekitar.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan hidup masyarakat, dan juga dapat menimbulkanketerampilan sesuaidengan ilmu dan pengetahuan yangdiperoleh.

2) Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana bisa dibilang kurang lengkap, Kegiatan rekreasi dan hiburan diberikan kepada anak binaan agar tidak terjadi kejenuhan ketika anak binaan dalam masa pelayanan, dan juga hal inidilakukan sesuai dengan pemenuhan hak-hak anaksesuai pasal 11 Undang-undang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri

Faktor Pendukung dalam Efektivitas Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak Terlantar di Kota Sukabumi adalah Kebijakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan isi rehabilitasi sosial anak jalanan/terlantar, gelandangan, pengemis dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Efektivitas Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Terlantar di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi masih dijumpai sejumlah kendala yang ada dalam Program Rehabilitasi anak. Faktor penghambat Program Prestasi ini yaitu: Sumber daya manusia, biaya, mengatur yang tidak tepat dan sesuai dengan kebutuhan, data, sarana dan prasarana dan sarana pendukung yang minim.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan juga pembahasan mengenai Efektivitas Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Terlantar di Kota Sukabumi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Anak Terlantar di Kota Sukabumi berdasarkan unsur Pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi sudah berjalan cukup baik. Unsur-unsur Efektivitas tersebut meneguhkan Kembali teori yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 2012: 53). Namun, dalam penerapannya masih dijumpai sejumlah kendala terutama terkait dengan beberapa aspek penunjang yang belum terpenuhi. Pada Sumber daya bahwa Dinas Sosial Kota Sukabumi masih kekurangan sumber daya manusia, biaya, sarana danprasarana, data dan sarana pendukung yang minim. Pada kualitas dan kuantitas dijelaskan bahwa kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sedangkan secara kuantitas masih banyak anak terlantar yang belum menerima pelayanan. Berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan, maka peneliti memberikan saran kepada Dinas Sosial Kota Sukabumi agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksana programPRESTASI menjadi sebuah aplikasi atau berbasis web. Dimensi kuantitasdi sini menyangkut tentang dukunganSDM, alokasi dana, dan memperbaruifasilitas pendukung sehingga lebih memadai. Dimensi kualitas terkaitdengan peningkatan menjadi sebuah aplikasi atau berbasis web agar lebih stabilnya sistem. Kepada pelaksana program terutama agar dapat memanfaatkan program ini untukmengakses guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan keadaan Anak Terlantar di Lingkungan Kota Sukabumi.

REFERENCES

Amelia, Rizcah. 2015. "Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar." *Skripsi*, 1–111.

Herlina, A. 2014. "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang." *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat* 5: 145–55.

Pande, Komang Felly, Aida Andrianawati, and Tita Cardiah. 2021. "Analisis Pola Penataan Ruang Panti Sosial Asuhan Anak Amanah Bandung Berdasarkan Aktivitas Dan Perilaku Penghuni." *Jurnal Arsitektur Archicentre* 4 (1): 35–44.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi No.6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraankesejahteraan sosial

Rahayu, Aristiana P, and Marini. 2022. "Pendampingan Pendidikan Bagi Anak Jalanan Dan Dhuafa Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Setiap Anak Fakultas Psikologi UMSurabaya

Masyarakat Miskin Kota Adalah Wujud Nyata Adanya Kesenjangan Sosia." *Jurnal Pengabdian* 6 (2): 320–29.

Steers, Richard M. 1980. Efektifitas Organisasi/ Richard M Steers. Jakarta: Erlangga.

Syarifsyah Asyraf Syabana. 2557. "Syabana. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Terlantar Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten." 4 (1): 88–100.

UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung jawab negara